

RENJA PERUBAHAN

DINAS KESEHATAN KOTA METRO

TAHUN 2022



DINAS KESEHATAN KOTA METRO

Jl. Jend. A.Yani No 2 Kel. Metro, Kec. Metro Pusat - Kota Metro

Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022 ini juga sebagai gambaran rencana Program Pembangunan Kesehatan Kota Metro dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Metro.

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan Masyarakat yang optimal melalui peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan secara merata, maka perlu kiranya dibuat Rencana Kerja Program Pembangunan Kesehatan untuk dapat dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan Kesehatan pada tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kami, untuk itu masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Rencana Kerja ini.

Metro,

2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO**



drg. ERLA ANDRIANTI, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 19650902 199203 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Masyarakat	12
III. TUJUAN, SASARAN	14
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	15
IV. PROGRAM, KEGIATAN	16
V. PENUTUP	23
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang selaras dengan Tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan (Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009).

Pembangunan daerah Kota Metro merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah pembangunan kesehatan di Kota Metro. Selain itu pembangunan kesehatan juga bertujuan meningkatkan kesehatan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Kota Metro dengan visi ***"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"***, ada lima misi yang harus di emban oleh pemerintah Kota Metro dan salah satu diantaranya berkaitan erat dengan masalah kesehatan yaitu ***"Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial"***.

Dalam RPJMD Kota Metro tertuang tujuannya adalah Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan strategi :

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Pemenuhan standar pelayanan puskesmas dan jaringannya
- Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin melalui JKN.

Arah Kebijakan :

- Menjamin akses dan mutu pelayanan Kesehatan
- Penerapan manajemen Puskesmas yang profesional dan akuntabel
- Meningkatkan sarana dan prasarana manajemen Rumah sakit
- Pemenuhan kebutuhan dr Spesialis
- Meningkatkan kepesertaan PBI-JKN yang tepat sasaran

GAMBARAN UMUM KESEHATAN KOTA METRO

A. Derajat Kesehatan

Gambaran mengenai derajat kesehatan mencakup indikator umur harapan hidup waktu lahir Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas, dan Morbiditas.

1. Umur harapan Hidup (UHH)

umur harapan hidup (UHH) Kota Metro yaitu 71,29 tahun (BPS-2019) dan untuk provinsi Lampung 70,51 tahun (BPS-2019).

2. Mortalitas

a. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (0-28 hari) pada tahun 2021 ada 8 kasus kematian dari 2409 kelahiran hidup (diperkirakan 3,3 per 1000 KH) disebabkan karena BBLR (2 kasus) Asfiksia (4 kasus), Penyebab lainnya (2 kasus).

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dapat digunakan untuk mengukur perubahan ketersediaan, tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas lingkungan, serta status sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan dari Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Metro, pada tahun 2021 terdapat kematian bayi sebanyak 8 bayi dari 2.409 bayi kelahiran hidup (0,8 per 1000 kelahiran hidup).

b. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak yang berumur < 5 tahun per 1000 kelahiran hidup, juga memberi gambaran mengenai status ekonomi dan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan dari Puskesmas pada tahun 2021, di Kota Metro kematian anak balita ada 3 anak.

c. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu melahirkan dapat digunakan untuk menunjukkan rendahnya keadaan sosial ekonomi dan PHBS, serta kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk Kota Metro jumlah kelahiran hidup masih belum mencapai 100.000 sehingga belum bisa diperkirakan angka kematian ibu (AKI). Sedangkan untuk jumlah kasus kematian ibu melahirkan, untuk tahun 2021 terdapat 5 kematian dari 2409 kelahiran hidup (208 per 100.000 KH).

3. Morbiditas

Angka kesakitan penduduk pada suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya pola penyakit dan penyakit potensial yang berkembang, baik penyakit menular maupun tidak menular. Pola penyakit yang ada di wilayah Kota Metro sampai tahun 2021, penyakit Hipertensi primer/essensial menduduki peringkat pertama pada pola penyakit rawat jalan di puskesmas.

Meningkatnya umur harapan hidup dan perubahan struktur umur penduduk ke arah usia tua menyebabkan terjadinya transisi epidemiologis, yang ditandai dengan masih tingginya penyakit Hipertensi primer/essensial.

Gambaran sepuluh besar penyakit pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sepuluh Penyakit Terbanyak pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Kota Metro Tahun 2021

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH
1	I10-Essential (primary) hypertension	6020
2	K30-Dyspepsia	4880
3	J00-Acute nasopharyngitis [common cold]	3891
4	M79.1-Myalgia	2651
5	J06.9-Acute upper respiratory infection, unspecified	2507
6	K00.6-Disturbances in tooth eruption	1447
7	K04.0-Pulpitis	1362
8	E11-Non-insulin-dependent diabetes mellitus	1236
9	L23-Allergic contact dermatitis	1138
10	J11-Influenza, virus not identified	1077

Sumber: Laporan e-Puskesmas tahun 2021

B. Keadaan Pelayanan Kesehatan

1. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Sarana pelayanan kesehatan dasar yang dimiliki kota Metro terdiri dari 11 Puskesmas induk dan jaringan pelayanannya yaitu 5 puskesmas pembantu (pustu) dan 11 mobil puskesmas keliling (pusling)/ambulans. Seluruh puskesmas telah dilengkapi dengan laboratorium sederhana dan dua diantara kedelapan puskesmas tersebut dilengkapi dengan fasilitas rawat inap yaitu Puskesmas Banjar Sari. Dengan jumlah penduduk Kota Metro 174.258 jiwa pada tahun 2022.

2. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasa diukur dengan jumlah RS dan tempat tidurnya (TT) serta rasio terhadap jumlah penduduk.

Rumah sakit yang ada di Kota Metro hingga akhir tahun 2021 sebanyak 9 unit, 2 rumah sakit milik pemerintah dan 7 rumah sakit milik swasta. Seluruh rumah sakit dilengkapi dengan laboratorium kesehatan dan dua diantara ketiga rumah sakit tersebut memiliki 4 (empat) spesialis dasar yaitu rumah sakit umum Jend. A. Yani dan RSIUD Sumpster Bantul.

C. Keadaan sumber daya kesehatan

1. Sumber Daya Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga diselenggarakan oleh swasta. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Jajaran Dinas Kesehatan Kota Metro dan Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2021 sebanyak 1.526 orang.

2. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan program pembangunan kesehatan di Kota Metro tahun 2019 bersumber dari Departemen Kesehatan (APBN), alokasi APBD Provinsi untuk kesehatan dan alokasi APBD Kota untuk kesehatan, untuk tingkat perkembangan pembiayaan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perkembangan Pembiayaan Kesehatan
Kota Metro Tahun 2017-2021**

No.	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN ANGGARAN (Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	APBD II	215.408.165.376	210.602.057.387	243.991.232.624	415.132.737.402	305.684.248.146
2.	APBD I	514.731.326	0	0	0	0
3.	APBN	14.791.170.000	0	0	0	0
4.	BLN/Hibah	36.751.000	52.868.000	17.610.000	17.610.000	48.671.400
5.	Sumber lain	2.452.112.000	0	0	0	0
Jumlah		81.129.576.145	155.521.066.453	217.182.846.683	233.202.929.702	305.635.5776.746

Sumber: Subbag Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kota Metro

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2020 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
- 5) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro
- 6) Keputusan Walikota Metro Nomor 19 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Metro Dinas Kesehatan adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825), dan terakhir diubah dengan Perda No. 3 tahun 2003.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
- 9) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran 6 Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - 11) Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - 12) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
 - 13) Perda Kota Metro No. 15 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA

Penyusunan Renja 2022 Dinas Kesehatan Kota Metro bertujuan untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan kesehatan dan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan Kesehatan di Kota Metro dalam mencapai visi dan misi Kesehatan Kota Metro.

Penyusunan Renja merupakan bentuk upaya merumuskan program pembangunan kesehatan yang terpadu, komprehensif, fokus dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi terakhir yang berkembang baik tingkat lokal maupun tingkat nasional dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik lokal maupun nasional yaitu target standar pelayanan minimal (SPM), target SDGs tahun 2030, target RPJMD Kota Metro, Target Indikator Kinerja Dinas Kesehatan.

Dengan disusunnya Rencana kerja SKPD ini dapat terarah kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra yang ada baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

A. Program-program yang belum memenuhi target

Realisasi kinerja yang tidak mencapai target adalah

1. Program Kesehatan ibu dan anak, cakupan yang belum memenuhi target yaitu indikator angka kematian ibu target 3/100.000 Kelahiran Hidup realisasi 5/100.000 Kelahiran Hidup
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Angka keberhasilan pengobatan TBC (success rate) dengan target 95% dengan realisasi 94,86%
3. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan target 0,22 dengan realisasi 0,23
4. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yaitu Umur Harapan Hidup dengan target 71,76 tahun dan realisasi 71,66 tahun.

B. Program yang telah memenuhi target

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Persentase peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN) dengan indikator kinerja target 85 % dan realisasi sebesar 95,72%
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah kasus kematian bayi target 12 per 2.409 kelahiran hidup dan realisasi sebesar 10 per 2.409 kelahiran hidup.
3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Prevalensi stunting pada anak balita target 9,90% dan realisasi sebesar 7,30%
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan dengan indikator kinerja Persentase puskesmas dengan tenaga Kesehatan sesuai standar target 91% dan realisasi 91%.
5. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan indikator kinerja Presentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial target 90% dan realisasi 100%.

C. Implikasi yang timbul dalam pencapaian target

Dengan tercapainya target baik SPM, IKU RPJMD maupun SDG's dapat meningkatkan indeks pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Metro, hasil riset kesehatan dasar 2010 Kota Metro menduduki urutan ke 3 dari 480 kabupaten/Kota. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan sesuai dengan visi misi yang diharapkan. Hasil survey indeks kesehatan masyarakat yang dilaksanakan selama tiga tahun ini mendapat nilai baik dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan penilaian dari orang diluar kesehatan yaitu mahasiswa. Dan untuk standar pelayanan minimal (SPM) 100 % sudah tercapai, yang belum memenuhi target adalah cakupan morbiditas, untuk itu perlu mendapat perhatian khusus.

Implikasi yang timbul dalam pencapain target menunjukkan hasil kinerja di bidang kesehatan sudah baik tetapi perlu di optimalkan lagi, karena penyakit atau morbiditas dan kematian (mortalitas) akan selalu dapat terjadi di masyarakat, untuk itu perlunya pengetahuan masyarakat tentang preventif dan promotif lebih baik dari pengobatan (kuratif) dan rehabilitative.

D. Kebijakan dan perencanaan

Dengan melihat penyebab dari belum tercapainya target yang telah ditetapkan salah satunya adalah faktor anggaran yang sangat minim pada kegiatan di bidang kesehatan. Untuk itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam menyikapi faktor tersebut. Sesuai dengan Kepmenkes tentang dana daerah untuk kesehatan adalah 10% dari APBD, selama ini belum sesuai dengan Kepmenkes. Mengingat kasus penyakit bertambah dengan adanya penyakit tidak menular yang mana selama ini belum menjadi prioritas dan saat ini menjadi penyebab kematian.

Dan untuk perencanaan kedepan perlu melihat dengan jelas isu strategis yang ada, sehingga dalam membuat kegiatan perlu prioritas yang harus dilaksanakan sehingga tujuan yang akan di capai dapat terwujud. Perlu juga inovasi-inovasi dalam melaksanakan kegiatan, tidak hanya mengikuti kegiatan tahun lalu, tetapi membuat kegiatan yang lebih efektif dan bermanfaat di masyarakat.

Perlunya perencanaan yang sesuai dengan kondisi yang ada serta masalah dan kebutuhan dalam mencapai visi dan misi Kota Metro secara umum dan visi misi Dinas Kesehatan secara khusus, dan adanya kerjasama lintas program dalam merencanakan suatu kegiatan agar dapat saling mendukung dalam peningkatan pelayanan di masyarakat.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Untuk Tahun 2021 kinerja pelayanan kesehatan di IKU RPJMD dari 9 indikator kinerja 4 indikator belum mencapai target, 5 indikator sudah mencapai target. dan untuk SPM 7 indikator belum mencapai target, 5 indikator mencapai target.

Dari hasil laporan akuntabilitas tahun 2021 dapat dilihat pencapaian target sesuai dengan indikator kinerja. Target dan Realiasi SPM (Standar pelayanan minimal) dan IKU RPJMD Kota Metro dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

A. Target dan Realisasi IKU (Indikator Kinerja Utama) RPJMD tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan Kesehatan	Persentase peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN)	85%	95,72%
		Angka Harapan Hidup	71,76	71,66
2	Meningkatnya upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian ibu	3	5
		Jumlah kasus kematian bayi	12	10
		Prevalensi stunting pada anak balita	9,90%	7,30%
		Angka keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	95%	94,86%
3	Meningkatnya sumberdaya manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga Kesehatan sesuai standar	91%	91%
4	Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat Kesehatan	Presentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	90%	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Indeks keluarga sehat	0,22 (tidak sehat)	0,23 (tidak sehat)

2 Realisasi kinerja dengan target Nasional (SPM)

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021				OPD Penanggung Jawab
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	2.770	2.678	97	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	2.647	2.499	94	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	%	2.521	2.409	96	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	10.112	9.425	93	Dinas Kesehatan

5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	%	22.986	19.538	85	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	%	113.397	87.398	77	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	15.781	15.781	100	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	17.170	33.672	100	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	3.890	3.993	100	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) berat	%	336	336	100	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang tertugaTB	%	2.073	1.737	84	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	3.527	3.652	100	Dinas Kesehatan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam pelaksanaan pelayanan dan meningkatkan kinerja pelayanan baik di Dinas maupun Puskesmas serta jaringannya sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan yaitu SPM, sedangkan untuk koordinasi dan sinergi program dengan Dinas Kesehatan Propinsi selalu dilaksanakan baik melalui laporan lisan maupun tertulis. Kegiatan program yang ada di Propinsi baik yang dilaksanakan propinsi maupun yang dilaksanakan di daerah melalui dana dekon dan APBD TK I langsung dikoordinasikan. Sedangkan untuk dana APBN berupa DAK koordinasi melalui Dinas Propinsi dalam menyampaikan proposal dan laporan Evaluasi. Dan untuk tahun 2022 ini pusat telah menggunakan software aplikasi yaitu E-Krisna, E-Renggar, E-Monev, E-Musrenbang, dan akan menggunakan E-Budgeting hal ini untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang ada di kesehatan.

Dengan berlandaskan visi “ *”Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”*, maka isu strategis dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Pemenuhan standar pelayanan puskesmas dan jaringannya
- Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin melalui JKN.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Program, kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro telah menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019. Setelah di implimentasikan Program kegiatan tahun sebelumnya ke permendagri 90 tahun 2019 banyak kegiatan tahun sebelumnya yang tidak mempunyai ruang di sub kegiatan pemendagri 90 tahun 2019 solusinya menggabungkan 2 atau 3 kegiatan menjadi 1 sub kegiatan. Untuk pertimbangan di perlukan penambahan sub kegiatan di permendagri 90 tahun 2019 agar kegiatan yang tahun sebelumnya mendapat ruang di sub kegiatan permendagri 90 tahun 2021.

2.4.1 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Usulan program kegiatan baik yang berasal dari seksi diharapkan ada hasil untuk masyarakat. Sedangkan usulan yang langsung dari masyarakat di mulai dari usulan masyarakat melalui kader posyandu, tokoh masyarakat, fasilitas kesehatan, kelurahan dan kecamatan lalu dilaksanakan musrenbang kesehatan yang dilaksanakan awal tahun 2021, pertemuan Musrenbang kelurahan, kecamatan, Kota untuk membuat RKPD Tahun 2022. Dengan musrenbang kesehatan tersendiri di dapat usulan-usulan langsung dari masyarakat untuk perbaikan sarana kesehatan dan program kesehatan yang ada di masyarakat.

Usulan-usulan yang datang dari masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di dinas kesehatan yaitu perbaikan sarana, prasarana, kegiatan posyandu, PHBS, pemberian makanan tambahan, fogging, vaksinasi anak sekolah, dana PPM, dana Hibah untuk organisasi yang bergerak di bidang kesehatan.

Dan usulan-usulan tersebut sesuai dengan usulan-usulan yang ada di Dinas Kesehatan setiap tahunnya. Hal ini dapat menggambarkan bahwa masyarakat sudah merasa bahwa kesehatan sangat penting sehingga mereka berharap mendapat pelayanan dengan sarana dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.

Usulan untuk tahun 2022 juga melalui Usulan musrenbang kelurahan, kecamatan dan Kota yang memadukan usulan usulan dari masyarakat yang melaksanakan kegiatan kesehatan di masyarakat. Dengan melihat kondisi yang ada, harapannya kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan suatu inovasi yang baik di tengah masyarakat agar tujuan yang akan di capai dapat terlaksana dengan sebaik baiknya, dengan melihat sasaran dan tujuan dari kesehatan itu sendiri.

BAB III

TUJUAN, SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan SDM RPJMN tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan **pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*)** dengan mendorong peningkatan upaya **promotif dan preventif**, didukung **inovasi dan pemanfaatan teknologi**. Program nasional ke 3 adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan Program Prioritas Nasional yaitu Peningkatan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari kegiatan prioritas Nasional yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup sehat
3. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan reproduksi
4. Penguatan pengendalian penyakit

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan (UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009).

Untuk mencapai tujuan nasional perlu melihat ancaman dan tantangan yaitu komitmen Pemerintah daerah dalam desentralisasi kesehatan, kurangnya manajemen SDM terutama dokter dalam peningkatan akses pelayanan, koordinasi lintas program dan sektoral yang belum terintegrasi, sistem informasi pelayanan kesehatan dasar yang belum optimal, perlunya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan. Dan sesuai dengan visi walikota perlu upaya-upaya untuk mencapai target SPM dan target Sdgs melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dana penunjang kegiatan tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan 10 % dari APBD pemerintah Daerah, perlu kegiatan kegiatan yang inovatif yang dapat menunjang program untuk tercapainya kondisi masyarakat yang sehat dan berkeadilan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro adalah:

A. TUJUAN

1. Meningkatkan sistem dan Manajemen Kesehatan yang terintegrasi, efektif dan efisien
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang merata, berkualitas dan berkeadilan
4. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan

B. SASARAN

1. Terciptanya sistem dan manajemen kesehatan yang terintegrasi, efektif dan efisien.
2. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat
3. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat melalui kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
4. Terwujutnya pelayanan kesehatan masyarakat yang merata
5. Terwujutnya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan
6. Tercapainya derajat kesehatan perorangan dan keluarga
7. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan

1.3.PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya", ada lima misi yang harus di emban oleh pemerintah Kota Metro dan salah satu diantaranya berkaitan erat dengan masalah kesehatan yaitu "Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial".

Dalam RPJMD Kota Metro tertuang tujuannya adalah Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan strategi :

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Pemenuhan standar pelayanan puskesmas dan jaringannya
- Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin melalui JKN.

b. Program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2022 telah menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019 terdiri dari 5 Program , 16 Kegiatan dan 70 sub kegiatan yaitu :

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1.02.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dok renja, Renstra
1.02.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya Dok Lakip dan SPIP
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokument (LPPD, Lap. SPM, PK,RKT,RAD, KAK, lap. Program/kegiatan)
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1.02.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA SKPD
1.02.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dok Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran
1.02.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan
1.02.01.2.03	Administrasi Umum	
1.02.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai

1.02.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon
1.02.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah registrasi Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 bayar
1.02.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jenis jasa administrasi keuangan
1.02.01.2.03.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor
1.02.01.2.03.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK
1.02.01.2.03.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Photo copy
1.02.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instal. Listrik/Penerangan
1.02.01.2.03.15	Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar
1.02.012.03.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Rapat konsumsi dan snack
1.02.01.2.03.18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas
1.02.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor, peralatan studio
1.02.01.2.03.25	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis Meubelair
1.02.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1.02.012.03.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala
1.02.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.02.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	
1 02 02 2.01 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Posyandu
1 02 02 2.01 09	Rehabilitas dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Mulyojati

1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Poskeskel yang di Rehab
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jenis Sarana dan Prasarana Puskesmas, posyandu
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alkes di Kalibrasi
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan dan distribusi obat dan E logistik Puskesmas
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis BMHP
1 02 02 2.02	Penyediaan layanan Kesehatan Rujukan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Prosentase Ibu Hamil Pelayanan kesehatan Ibu hamil
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Prosentase Ibu bersalin Pelayanan persalinan
1.02.02.202.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Prosentase bayi baru lahir Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar
1.02.02.202.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Prosentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Presentase orang usia 15 s.d 59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Presentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Presentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Presentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02 2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

1 02 02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase orang dengan resiko HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi Dini HIV sesuai standar
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Ibu hamil dan balita yang mendapatkan PMT pemulihan
1 02 02 2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Institusi dan Sekolah yang di bina
1 02 02 2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM Pilar
1.02.02.202.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pomkes di berbagai media
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pelayanan Imunisasi
		Pelayanan pasien haji dan pasien luar wilayah,
1.02.02.202.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Alat Penyebarluasan Informasi Kesehatan
1 02 02 2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin Kota Metro di Luar Quota PB
1.02.02.202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tesusnya Dok Kota Sehat
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pengelolaan Dana BLUD RSUD A. Yani
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Puskesmas
1. 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah kapitasi Puskesmas
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Re-Akreditasi dan Akreditasi Puskesmas
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
1 02 02 2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	SIK Terintegrasi
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan swasta yang dan Puskesmas
		Jumlah Kemitraan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.01.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah sarana yang disurvei lapangan untuk tenaga kesehatan, saryankes,
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

1.02.03.2.02	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
1.02.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dan pengawasan zona integritas
1.02.03.2.02.02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Peningkatan Tata Kelola rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	
1.02.03.2.03.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pertemuan teknis Rencana Kebutuhan nakes
1 02 03 2.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1 02 03 2.04 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti penilaian usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan
1 02 03 2.05	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1 02 03 2.05 01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan Terpilih
1 02 03 2.05 02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan mutu kepegawaian
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri Rumah Tangga yang mendapatkan pelatihan PIRT

1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pertemuan peningkatan pengawasan obat dan makanan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
1.02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kelurahan mendapatkan Stimulan perberdayaan UKBM
1.02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pembinaan Kesrak PKK KB Kesehatan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kader Posyandu Balita dan Lansia yang menadapatkan insentif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2022 program dan kegiatan telah sesuai Permendagri 90 tahun 2019 dapat di lihat sebagai berikut.

BAB V

PENUTUP

Demikian uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun Anggaran 2022, dan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian :

1. Kegiatan Preventif dan rehabilitatif merupakan kegiatan yang perlu ditingkatkan agar dana tidak banyak untuk kegiatan kuratif.
2. Prioritas dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil musrenbang sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan perlu mendapat perhatian agar pelayanan publik dapat menghasilkan pelayanan prima.
4. Kota Metro telah melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional dengan indikator kinerja persentase peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan target 85% dan capaian tahun 2021 sebesar 95,72%.
5. Perlu dibuat Rencana Aksi daerah untuk pelaksanaan kegiatan baik yang ada di IKU RPJMD, SPM dan Sdgs.

LAMPIRAN

**MATRIK RKPD PERUBAHAN
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA METRO**

pagu sipd 314.986.541.964,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	APBD 2022			PERUBAHAN APBD 2022		
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			272.941.136.374,00			314.986.541.964,00
1 02 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan	12 bulan	226.432.415.784,00	Cakupan penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan	12 bulan	274.308.582.204,00
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	146.974.000,00	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	128.674.000,00
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	59.000.000,00	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	56.200.000,00
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	2 dokumen	27.000.000,00	Jumlah dokumen RKA SKPD	2 dokumen	27.000.000,00
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	60.974.000,00	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	45.474.000,00
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	57.758.768.359,00	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	59.759.489.671,00
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	53.947.948.359,00	Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	56.021.065.671,00
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	3.792.320.000,00	Cakupan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	3.719.924.000,00
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan	1 dokumen	12.500.000,00	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan	1 dokumen	12.500.000,00
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	6.000.000,00	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	6.000.000,00
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	343.577.400,00	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	243.182.700,00
1 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan mutu kepegawaian	150 orang	33.577.400,00	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan mutu kepegawaian	150 orang	26.058.600,00
1 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih	9 orang	50.000.000,00	Jumlah tenaga kesehatan teladan terpilih	9 orang	48.100.000,00
1 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	800 orang	240.000.000,00	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	525 orang	150.000.000,00
1 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis	41 orang	20.000.000,00	Jumlah pegawai yang mendapat bimbingan teknis	41 orang	19.024.100,00

1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	249.515.500,00	Cakupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	233.993.000,00	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	18.383.000,00	Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	18.383.000,00
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	79.998.500,00	Cakupan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	75.291.000,00
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	38.000.000,00	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	37.185.000,00
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	53.400.000,00	Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	43.400.000,00
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	59.734.000,00	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	59.734.000,00
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	146.999.517,00	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	171.099.517,00	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	600 lembar	6.000.000,00	Jumlah materai	600 lembar	6.000.000,00
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	140.999.517,00	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	165.099.517,00
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang-barang milik daerah	12 bulan	265.310.000,00	Cakupan pemeliharaan barang-barang milik daerah	12 bulan	272.310.000,00	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	69.970.000,00	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	69.970.000,00
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/ lapangan	12 bulan	149.960.000,00	Cakupan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/ lapangan	12 bulan	149.960.000,00
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terpelihara	2 jenis	10.000.000,00	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terpelihara	2 jenis	12.000.000,00
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	10.700.000,00	Cakupan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	15.700.000,00
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung	12 bulan	24.680.000,00	Cakupan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung	12 bulan	24.680.000,00
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan operasional pelayanan BLUD	12 bulan	167.521.271.008,00	Cakupan operasional pelayanan BLUD	12 bulan	213.499.833.316,00	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	167.521.271.008,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	213.499.833.316,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Banjarsari	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	752.215.500,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	835.527.051,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Metro	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.080.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.183.345.691,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Yosomulyo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.123.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.451.252.272,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Ganjar Agung	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	630.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	777.025.803,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Iringmulyo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	916.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	1.047.822.598,00

1	02	01	2.10	01	Puskesmas Karangrejo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	495.890.500,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	631.556.664,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Mulyojati	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	391.943.343,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	514.118.797,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Yosodadi	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	451.587.047,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	632.691.447,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Purwosari	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	284.124.098,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	434.946.059,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Tejo Agung	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	546.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	604.865.880,00
1	02	01	2.10	01	Puskesmas Margorejo	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	760.510.520,00	Cakupan operasional pelayanan puskesmas BLUD	12 bulan	889.828.993,00
1	02	01	2.10	01	RSUD Jend. A Yani	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	12 bulan	160.000.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	12 bulan	203.591.714.029,00
1	02	01	2.10	01	RSUD Sumbersari Bantul	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	12 bulan	90.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD BLUD	12 bulan	905.138.032,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	71,9 tahun	44.412.610.650,00	Angka Harapan Hidup	71,9 tahun	38.610.075.220,00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	12 bulan	10.105.518.600,00	Cakupan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	12 bulan	7.761.461.820,00
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah RSUD mendapat pembangunan beserta sarana dan prasarananya	1 RSUD	3.000.000.000,00	Jumlah RSUD mendapat pembangunan beserta sarana dan prasarananya	1 RSUD	686.526.000,00
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah pengembangan puskesmas	1 paket	50.000.000,00	Jumlah pengembangan puskesmas	1 paket	50.000.000,00
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan posyandu, poskeskel, pustu, dan faskes lainnya	1 paket	1.000.000,00	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan posyandu, poskeskel, pustu, dan faskes lainnya	1 paket	-
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	20 paket	2.484.106.000,00	Jumlah paket pengadaan alat kesehatan	20 paket	2.484.106.000,00
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan dikalibrasi	100 unit	120.000.000,00	Jumlah alat kesehatan dikalibrasi	100 unit	98.000.000,00
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan	2 jenis	3.859.058.600,00	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan	2 jenis	3.851.475.820,00
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan medis habis pakai	3 jenis	591.354.000,00	Jumlah jenis bahan medis habis pakai	3 jenis	591.354.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 persen	33.733.423.950,00	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100 persen	30.314.565.300,00
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2759 orang	50.000.000,00	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2759 orang	44.750.000,00
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2648 orang	124.815.000,00	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2648 orang	124.815.000,00
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2533 orang	30.000.000,00	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2533 orang	18.900.000,00
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15122 orang	50.000.000,00	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15122 orang	50.000.000,00

1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21222 orang	41.428.800,00	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21222 orang	31.170.800,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	112681 orang	25.000.000,00	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	112681 orang	22.885.000,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19423 orang	42.000.000,00	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19423 orang	38.310.000,00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33320 orang	140.000.000,00	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33320 orang	140.000.000,00
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4063 orang	40.000.000,00	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4063 orang	28.000.000,00
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	350 orang	40.000.000,00	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	350 orang	34.999.800,00
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2073 orang	151.278.450,00	Jumlah orang terduga menderit tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2073 orang	136.150.600,00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3705 orang	40.000.000,00	Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3705 orang	30.915.000,00
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kelurahan mendapatkan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	22 kelurahan	117.353.000,00	Jumlah kelurahan mendapatkan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	22 kelurahan	98.807.000,00
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah institusi dan sekolah yang mendapat pembinaan kesjaor	40 unit	20.000.000,00	Jumlah institusi dan sekolah yang mendapat pembinaan kesjaor	40 unit	18.050.000,00
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pilar STBM	22 kelurahan	67.890.000,00	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pilar STBM	22 kelurahan	61.248.000,00
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kelurahan mendapat pelayanan promosi kesehatan	22 kelurahan	100.000.000,00	Jumlah kelurahan mendapat pelayanan promosi kesehatan	22 kelurahan	90.000.000,00
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kelurahan UCI	22 kelurahan	90.000.000,00	Jumlah kelurahan UCI	22 kelurahan	76.000.000,00
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah kecamatan mendapat pelayanan pelayanan Public Safety Center	5 kecamatan	105.000.000,00	Jumlah kecamatan mendapat pelayanan pelayanan Public Safety Center	5 kecamatan	89.200.500,00
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat peserta PBI JKN mendapat bantuan iuran	52085 orang	21.264.000.000,00	Jumlah masyarakat peserta PBI JKN mendapat bantuan iuran	52085 orang	18.572.821.600,00
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen kota sehat	1 dokumen	48.034.700,00	Jumlah dokumen kota sehat	1 dokumen	22.918.000,00

1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	2.162.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	1.600.000.000,00
1	02	02	2.02	32	RSUD Jend. A Yani	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	162.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	-
1	02	02	2.02	32	RSUD Sumpster Bantul	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	2.000.000.000,00	Cakupan operasional pelayanan RSUD	12 bulan	1.600.000.000,00
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	8.428.500.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	8.428.500.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Banjarsari	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	644.237.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	644.237.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Metro	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	849.416.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	849.416.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Yosomulyo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	879.143.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	879.143.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Ganjar Agung	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	711.597.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	711.597.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Iringmulyo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	881.111.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	881.111.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Karangrejo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	578.451.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	578.451.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Mulyojati	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	610.727.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	610.727.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Yosodadi	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	628.903.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	628.903.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Purwosari	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	558.770.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	558.770.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Tejo Agung	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	569.895.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	569.895.000,00
1	02	02	2.02	33	Puskesmas Margorejo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	753.869.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	753.869.000,00
1	02	02	2.02	33	BOK Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang operasional pelayanannya terpenuhi	11 puskesmas	762.381.000,00	Jumlah puskesmas yang operasional pelayanannya terpenuhi	11 puskesmas	762.381.000,00
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	110.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	110.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Banjarsari	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Metro	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Yosomulyo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Ganjar Agung	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Iringmulyo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Karangrejo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Mulyojati	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Yosodadi	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Purwosari	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	34	Puskesmas Tejo Agung	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00

1	02	02	2.02	34	Puskesmas Margorejo	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00	Cakupan operasional puskesmas	12 bulan	10.000.000,00
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang melakukan reakreditasi	9 puskesmas	446.124.000,00	Jumlah puskesmas yang melakukan reakreditasi	9 puskesmas	446.124.000,00
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen informasi kesehatan	2 dokumen	128.871.000,00	Jumlah dokumen informasi kesehatan	2 dokumen	121.671.000,00
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang memiliki data dan informasi kesehatan terintegrasi	11 puskesmas	75.000.000,00	Jumlah puskesmas yang memiliki data dan informasi kesehatan terintegrasi	11 puskesmas	75.000.000,00
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapat monitoring pemanfaatan sistem informasi kesehatan	11 puskesmas	53.871.000,00	Jumlah puskesmas yang mendapat monitoring pemanfaatan sistem informasi kesehatan	11 puskesmas	46.671.000,00
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin	100 persen	444.797.100,00	Persentase rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin	100 persen	412.377.100,00
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas dan fasyankes swasta yang mendapat pembinaan	30 sarana	355.297.100,00	Jumlah puskesmas dan fasyankes swasta yang mendapat pembinaan	30 sarana	332.337.100,00
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat pembinaan dan pengawasan mutu	40 sarana	24.500.000,00	Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat pembinaan dan pengawasan mutu	40 sarana	15.190.000,00
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang disurvei lapangan untuk sistem rujukan	12 sarana	65.000.000,00	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang disurvei lapangan untuk sistem rujukan	12 sarana	64.850.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	92 persen	110.000.000,00	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	92 persen	98.974.600,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	11 puskesmas	60.000.000,00	Jumlah puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	11 puskesmas	50.281.000,00
1	02	03	2.02	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen perencanaan SDM	2 dokumen	34.236.800,00	Jumlah dokumen perencanaan SDM	2 dokumen	24.517.800,00
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM yang mengikuti penilaian usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional	100 orang	25.763.200,00	Jumlah SDM yang mengikuti penilaian usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional	100 orang	25.763.200,00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	100 persen	50.000.000,00	Cakupan terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	100 persen	48.693.600,00
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	30 orang	50.000.000,00	Jumlah SDM yang mendapat pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis	30 orang	48.693.600,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92 persen	135.000.000,00	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	92 persen	125.860.000,00
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	100 persen	105.000.000,00	Cakupan penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	100 persen	98.860.000,00

1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan pelatihan PIRT	80 IRT	105.000.000,00	Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan pelatihan PIRT	80 IRT	98.860.000,00
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	100 persen	30.000.000,00	Cakupan pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	100 persen	27.000.000,00
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah sarana yang mendapat pengawasan obat dan makanan	30 sarana	30.000.000,00	Jumlah sarana yang mendapat pengawasan obat dan makanan	30 sarana	27.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	0,27	1.851.109.940,00	Indeks Keluarga Sehat	0,27	1.843.049.940,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	100 persen	419.509.940,00	Cakupan advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	100 persen	415.509.940,00
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelurahan mendapatkan peningkatan upaya advokasi dan pemberdayaan masyarakat	22 kelurahan	419.509.940,00	Jumlah kelurahan mendapatkan peningkatan upaya advokasi dan pemberdayaan masyarakat	22 kelurahan	415.509.940,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	22 kelurahan	40.600.000,00	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	22 kelurahan	36.540.000,00
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah pembinaan lintas program/ sektor dalam rangka Kesrak PKK-KB-Kesehatan tingkat Kelurahan/ Provinsi/ Nasional	2 kali	40.600.000,00	Jumlah pembinaan lintas program/ sektor dalam rangka Kesrak PKK-KB-Kesehatan tingkat Kelurahan/ Provinsi/ Nasional	2 kali	36.540.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	100 persen	1.391.000.000,00	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	100 persen	1.391.000.000,00
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kader posyandu mendapat insentif dan bimbingan teknis	1155 orang	1.391.000.000,00	Jumlah kader posyandu mendapat insentif dan bimbingan teknis	1155 orang	1.391.000.000,00

METRO, JULI 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO

drg. ERLA ANDRIANTI, MARS.
NIP. 19650902 199203 2 005